

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kebijakan yang dapat digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM yaitu

1. BPSK Kota Yogyakarta (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
BPSK merupakan pelaksana perlindungan konsumen dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Payung hukum yang memayungi UMKM di Kota Yogyakarta (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
3. Bidang pengembangan sumber daya UMKM, satuan bidang dalam Disperindagkoptan Yogyakarta yang mengurus UMKM.

Setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta menjadi kurang maksimal, keadaan tersebut mengakibatkan konsumen banyak dirugikan. Kurang maksimalnya upaya pencegahan penyimpangan dapat terlihat dari tidak diberikannya akomodasi yang maksimal kepada BPSK yang merupakan pelaksana perlindungan konsumen di lingkup Kota Yogyakarta, fokus Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM terfokuskan pada pengembangan UMKM saja, itu terlihat dari RAK

periode 2014-2015 dan aturan yang memayungi UMKM hanya terfokuskan pada pengembangan UMKM terlihat dari isi Perda No. 4 Tahun 2011, terlihat dari tidak adanya tugas pengendalian bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Perda No.4 Tahun 2011 yang telah diamanatkan oleh PP No 17 Tahun 2013. Ketiga hal tersebut membuat konsumen yang selama ini dirugikan oleh arah pengembangan UMKM tidak mengerti apa saja yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi hak-haknya di kota Yogyakarta.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah Kota Yogyakarta agar dalam mengambil kebijakan tentang UMKM tidak semata-mata hanya memfokuskan pada ranah pengembangan saja. Karena banyaknya insentif yang diberikan kepada UMKM membuat keinginan untuk melakukan penyimpangan terhadap suatu peraturan sangatlah besar. Jika penyimpangan dihindari hanya dengan pembentukan pola pikir dirasa kurang cukup, karena dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi khususnya dalam ranah hukum persaingan. Dibutuhkan aturan yang dapat menjadi standar pelaksana agar permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta mengenai penyimpangan yang muncul dari dikecualikannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dapat dicegah oleh pihak yang berwenang melakukannya.

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Yogyakarta agar memberikan *power* yang lebih kepada BPSK. Karena kebijakan yang selama ini muncul membuat BPSK semakin tidak dikenal oleh konsumen. Padahal jika dilihat

dari tugas BPSK dan struktur keanggotaannya, yang dapat menjemput perkara dan di isi oleh semua pihak yang terkait dalam ranah perlindungan konsumen maka upaya pencegahan dapat dilaksanakan.

2. Merubah fungsi dan tugas bidang pengembangan sumber daya UMKM menjadi berimbang antara ranah pengembangan UMKM dengan ranah perlindungan konsumen.
3. Mengamandemen Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 agar disesuaikan dengan PP No. 17 Tahun 2013.

Daftar Pustaka

Buku:

Hermansyah (2008) *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kristiyanti, C.T.I (2011) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2011

Lubis, F.A. dkk.(2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.

Sitompul, A (1999) *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syawali Husni dan Imaniyati Neni Sri (ed), 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju. Bandung

Tambunan, T.H.T. (2004) *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Tangerang.

Usman, R (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, G., dan Yani Ahmad, (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Widiastuti, Y.S.M., Widijantoro, J., dan Harsiwi, A.M. (2014). *Laporan Hasil Penelitian: Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal:

Hasan Jauhari, 2008, Tinjauan Pengecualian Undang-Undang NO5 Tahun 1999 Bagi Usaha kecil dan Menengah, Vol. XVII-September 2008, Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Internasional.

Narain, S. (2003). Institutional Capacity-Building For Small and Medium-Sized Enterprise Promotion and Development, Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific, No 2, Bangkok: UN-ESCAP

Website:

Kamila, S. 2011. *UU Anti monopoli dan Dampaknya terhadap Usaha Kecil Menengah*. Diakses dari <http://fira-fieracamiela.blogspot.com/2011/05/uu-anti-monopoli-dan-dampaknya-terhadap.html>
1 Februari 2015

Puspita, T. 2012 *Perlindungan Konsumen*. DIakses dari <http://tantipuspita.blogspot.com/2012/05/1.html>
1 Februari 2015

Wardiano, K. 2010. *Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen: Sebagai Pandangan yang Terhegemoni*. Diakses dari

<https://kelikwardioNowordpress.com/2010/12/28/persaingan-usaha-dan-perlindungan-konsumen-sebuah-pandangan-yang-terhegemoni-2/>

1 Februari 2015

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan-Pemerintah No17 Tahun 2013 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang No20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

Kamus:

Ali, L. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2. Perum Balai Pustaka. Jakarta. 943



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3582

7370/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REGV/109/12/2014 Tanggal : 04/12/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : DEVI RAIMON MARLISSA NO MHS / NIM : 100510389
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Mrican 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : UPAYA HUKUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN UU NO 5 TAHUN 1999 OLEH UMKM

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 04/12/2014 Sampai 04/03/2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

DEVI RAIMON MARLISSA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 5-12-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta



SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/109/12/2014

embaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA** Nomor : **535/V**
anggal : **2 DESEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- lengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DEVI RAIMON MARLISSA** NIP/NIM : **10389**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **UPAYA HUKUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN UU NO 5 TAHUN 1999 PLEH UMKM**
Lokasi :
Waktu : **4 DESEMBER 2014 s.d 4 MARET 2015**

engan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **4 DESEMBER 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dr. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19540625198503 2 006

embusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		No. Rek SKPD 1.16.1.16.01.1.103.003	Formulir RKA SKPD 2.2.1
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015			
Unsur Pemerintahan	1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Organisasi	1 15 1 15 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian	
Program	1 15 1 15 01 103	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK	
Kegiatan	1 15 1 15 01 103 003	Kajian Sumberdaya UMKM	
Lokasi Kegiatan	Kecamatan Umbulharjo		
Jumlah Tahun 2012	Rp. 465.400.000,-		
Jumlah Tahun 2013	Rp. 189.000.000		
Jumlah Tahun 2014	Rp. 227.610.000		
Jumlah Tahun 2015	Rp. 209.999.000		
Jumlah Tahun 2016	Rp.		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		Target Kinerja	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Rp. 6.000.000.000,00	209.999.000
Capaian Program	Meningkatnya omzet UMKM dari Rp.138.000.000,00,- menjadi Rp.144.000.000,00,-	Rp.	
Masukan	Tersedianya Dana SDM Sarana dan Prasarana : Komputer ruang pertemuan, meja, kursi soundsystem	34 org 1 unit 1 set 1 unit	
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kajian Optimalisasi Griya UMKM - Terlaksananya Kajian Program pengembangan Kapasitas bagi UMKM, Swakelola dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN/Lembaga Pemerintah - Terlaksananya Kajian Pengembangan XT Square dalam mendukung UMKM Kota Yk - Terlaksananya Optimalisasi Forkom UMKM - Terlaksananya Workshop / Talk Show UMKM - Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD) - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundangan bagi UMKM - Terlaksananya Studi orientasi dan sinkronisasi Kajian pengembangan UMKM - Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi program ke Deputi Kajian ke Kementerian Kop dan UKM - Terlaksananya Sosialisasi Ensiklopedi Balik Yogyakarta - Terlaksananya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM 	1 paket 1 paket 1 kali 2 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali /4oh 2 kali 2 kali 2 kali	
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Termanfaatkannya Dokumen Kajian Optimalisasi Griya UMKM - Terealisirnya hasil Kajian Program pengembangan Kapasitas bagi UMKM(Swakelola dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN/Lembaga Pemerintah) - Termanfaatkannya Dokumen Kajian Pengembangan XT Square dalam mendukung UMKM Kota Yk - Tercapainya pelaksanaan Optimalisasi Forkom UMKM - terinformasikannya hasil Workshop / Talk Show UMKM - Diperoleh saran dan tindak lanjut dari Forum Group Discussion (FGD) - Dipahaminya materi Sosialisasi Peraturan dan Perundangan bagi UMKM - Terinformasikannya hasil Studi orientasi dan sinkronisasi Kajian pengembangan UMKM - Terjalin komunikasi, Koordinasi dan konsultasi program ke Deputi Kajian ke Kementerian Kop dan UKM - Tersosialisasikannya Ensiklopedi Balik Kota Yogyakarta - Termanfaatkannya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM 	1 paket 1 paket 1 kali 60 org 2 kali 60 UMKM 2 kali 60 UMKM 1 kali 30 org 2 kali 4 org 2 kali 4 org 2 kali 60 sasaran/org/lembaga 2 kali 60 UMKM.tekoh masyarakat	

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2015				Tahun
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1 15 1 15 01 103 003 5	BELANJA DAERAH				209.999.000	
1 15 1 15 01 103 003 5 2	BELANJA LANGSUNG				209.999.000	
1.15 1.15.01 103 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI				8.390.000	
1.15 1.15.01 103 003 5 2 1 01	Honorarium PNS				8.390.000	
1.15 1.15.01 103 003 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi kajian dan Pengembangan UMKM				7.245.000	
	• Ketua	1 org x 7 bln	7	ob	85.000	595.000
	• Sekretaris	1 org x 7 bln	7	ob	80.000	560.000
	• Anggota	10 org x 7 bln	70	ob	75.000	5.250.000
	Honorarium Non PNS Tim Koordinasi kajian dan Pengembangan UMKM					
	• Anggota	2 org x 7 bln	14	ob	60.000	840.000
	• PPKom	1 org x 3 bl	3	ob	140.000	420.000
	• Selsih					5.000
1.15 1.15.01 103 003 5 2 1 01 02	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				720.000	
	• Pejabat Pengadaan	3 org x 1 bl	3	ob	140.000	420.000
	• Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3 org x 1 bl	3	ob	85.000	255.000
	• Selsih					45.000
1.15 1.15.01 103 003 5 2 2	BELANJA BARANG & JASA				201.609.000	
1.15 1.15.01 103 003 5 2 2 01	Belanja bahan pakal habis				3.300.000	
1.15 1.15.01 103 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.300.000	
	• Workshop pelaku UMKM bagi UMKM	30 pkt x 2 kl	60	pkt	10.000	
	• Ballpoint	30 bh x 2 kl	60	bh	2.000	120.000
	• Buku tulis/blognote	30 bh x 2 kl	60	bh	3.000	180.000
	• Stoffmap	30 bh x 2 kl	60	bh	5.000	300.000
	• Forum Group Discussion (FGD)	30 pkt x 2 kl	60	pkt	10.000	
	• Ballpoint	30 bh x 2 kl	60	bh	2.000	120.000
	• Buku tulis/blognote	30 bh x 2 kl	60	bh	3.000	180.000
	• Stoffmap	30 bh x 2 kl	60	bh	5.000	300.000
	• Sosialisasi Peraturan dan Perundangan UMKM	30 pkt x 1 kl	30	pkt	10.000	
	• Ballpoint	30 bh x 1 kl	30	bh	2.000	60.000
	• Buku tulis/blognote	30 bh x 1 kl	30	bh	3.000	90.000
	• Stoffmap	30 bh x 1 kl	30	bh	5.000	150.000
	• Optimalisasi Forkom UMKM	60 pkt x 1 kl	60	pkt	10.000	
	• Ballpoint	60 bh x 1 kl	60	bh	2.000	120.000
	• Buku tulis/blognote	60 bh x 1 kl	60	bh	3.000	180.000
	• Stoffmap	60 bh x 1 kl	60	bh	5.000	300.000
	• sosialisasi Ensiklopedi Balik Kota, Yogyakarta	30 pkt x 2 kl	60	pkt	10.000	
	• Ballpoint	30 bh x 2 kl	60	bh	2.000	120.000
	• Buku tulis/blognote	30 bh x 2 kl	60	bh	3.000	180.000
	• Stoffmap	30 bh x 2 kl	60	bh	5.000	300.000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD 22.1

Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan	: 1.15	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Organisasi	: 1.15.1.15.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Program	: 1.15.1.15.001.103	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK
Kegiatan	: 1.15.1.15.001.103.04	Pengembangan Sumber Daya UMKMK
Lokasi Kegiatan		Kecamatan Umbulharjo
Jumlah Tahun 2012		: Rp. 67.570.000,-
Jumlah Tahun n-		: Rp. 535.000.000,-
Jumlah Tahun n+		: Rp. 657.454.882

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Rp. 8 Miliar	Rp. 657.454.882
Capaian Program	Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 136 milyar menjadi Rp. 144 milyar		
Masukan	Tersedianya Dana SDM Sarana dan Prasarana Komputer Ruang pertemuan, meja, kursi Soundsystem	30 org 1 unit 1 set 1 unit	
Keluaran	1 Terlaksananya Bimbuluh pengetahuan desain Kemasan Produk umkm 2 Terlaksananya Bimbuluh keamanan pangan bagi umkm di bidang kuliner 3 Terlaksananya pembuatan buku pembukuan praktis bagi UMKMK seri 2 4 Terlaksananya Bintek pembukuan secara praktis bagi UMKMK 5 Terlaksananya studi orientasi pengembangan produk UMKMK 6 Terlaksananya pengembangan wawasan UMKMK 7 Terlaksananya Lomba desain batik khas Yogyakarta 8 Terlaksananya UMKMK award (penghargaan UMKMK berprestasi) 9 Terlaksananya kemitraan antarmember DEKRANASDA kota Yogyakarta Terlaksananya ajang promosi/pameran Terlaksananya pengembangan wawasan UMKMK	2 kali 2 kali 1 Paket 2 Kali 1 kali 1 Kali 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali	
Hasil	1 Peserta mempunyai kemampuan dan ketrampilan produk desain 2 Peserta bisa memproduksi makanan kuliner yang aman 3 Terbitnya buku pembukuan praktis bagi UMKMK seri 2 4 Peserta bisa membuat pembukuan secara praktis 5 Peserta bisa mengembangkan produk-produk UMKMK 6 Bertambahnya wawasan/ orientasi peserta dalam rangka pengembangan UMKMK 7 Terciptanya desain batik khas Yogyakarta 8 Peserta bisa menjadi UMKMK I tetapan bagi UMKMK yang lain 9 Terciptanya rasa persaudaraan, saling membutuhkan, bersinergi sesama member Pelaku UMKMK bisa menemukan pasar Bertambahnya wawasan peserta dalam rangka pengembangan UMKMK	2x30 UMKMK 2x30 UMKMK 1 Paket 2x30 UMKMK 2x30 UMKMK 60 Orang 3 Desain 1 kali 1 kali 3x3 UMKMK 1 kali	

Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKMK

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2013				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.001.103.004.5	BELANJA DAERAH				659.824.474	
1.15.1.15.001.103.004.5.2	BELANJA LANGSUNG				12.275.000	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI				12.275.000	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.1.01	Honorarium PNS				11.300.000	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksana Kegiatan					
	- PPKom	1 org x 3 bl	3 ob	150.000	450.000	
	- Honorarium Tim Pengembangan Sumberdaya UMKMK	1 org x 6 bl	6 ob	70.000	420.000	
	- Sekretaris	6 org x 6 bl	36 ob	65.000	2.340.000	
	- Anggota					
	- Honorarium Non PNS Tim Pengembangan Sumberdaya UMKMK	2 org x 6 bl	12 ob	55.000	660.000	
	- Anggota					
	- Honorarium tim pelaksana DEKRANASDA	1 org x 6 bl	6 ob	80.000	3.720.000	
	- Sekretaris	6 org x 6 bl	36 ob	70.000	2.520.000	
	- Anggota					
	- Honorarium Non PNS tim pelaksana DEKRANASDA	2 org x 6 bl	12 ob	60.000	720.000	
	- Anggota					
	Honorarium non PNS				3.710.000	
	- Honorarium panitia pelaksana kegiatan DEKRANASDA	1 org x 6 bl	6 ob	95.000	570.000	
	- Ketua	8 org x 6 bl	48 ob	65.000	3.120.000	
	- Anggota				20.000	
	- Scliaih					
1.5.1.15.001.103.004.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa				975.000	
	- Pejabat pengadaan	2 org x 2 bln	4 ok	150.000	600.000	
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1 org x 3 pkt	3 ok	125.000	375.000	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				647.549.474	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis				3.300.000	
1.15.1.15.001.103.004.5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor				600.000	
	- Bimbuluh Keamanan Pangan bagi produk-2 UMKMK	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	2.000	120.000	
	- ballpoint	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- buku	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- stopmap	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- Bimbuluh Pengetahuan Desain kemasan produk -2 UMKMK	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	2.000	120.000	
	- ballpoint	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- buku	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- stopmap	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- Bintek pembukuan buku UMKMK	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	2.000	120.000	
	- ballpoint	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- buku	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- stopmap	30 org x 1 bh x 2 kl	60 pkt	4.000	240.000	
	- kemitraan antarmember DEKRANASDA kota Yogyakarta	125 org x 1 bh x 1 kl	125 pkt	2.000	250.000	
	- ballpoint	125 org x 1 bh x 1 kl	125 pkt	4.000	500.000	
	- buku	125 org x 1 bh x 1 kl	125 pkt	4.000	500.000	
	- stopmap	125 org x 1 bh x 1 kl	125 pkt	4.000	500.000	
	- FGD RTL kegiatan DEKRANASDA kota Yogyakarta	25 org x 1 bh x 1 kl	25 pkt	2.000	50.000	
	- ballpoint	25 org x 1 bh x 1 kl	25 pkt	4.000	100.000	
	- buku	25 org x 1 bh x 1 kl	25 pkt	4.000	100.000	
	- stopmap	25 org x 1 bh x 1 kl	25 pkt	4.000	100.000	

Data UMKM

Tahun	Target	Realisasi			
		mikro	kecil	menengah	total
2012	22.341	18.348	3.315	740	22.403
2013	22.591	18.600	3.365	750	22.715
2014	22.841	18.779	3.386	751	22.916
2015	23.091	19.005	3.413	752	23.170
2016	23.341	19.149	3.558	761	23.468